

ABSTRAK

Kasus hilangnya dana nasabah akibat kelemahan sistem perbankan menjadi permasalahan serius dalam dunia perbankan modern. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan serta lemahnya regulasi terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perbankan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pemidanaan terhadap bank sebagai badan hukum masih terbatas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang dirugikan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan pemidanaan bagi bank dalam kasus hilangnya dana nasabah akibat kelemahan sistem perbankan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menegaskan bahwa badan hukum dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana melalui sistem yang lalai atau tidak memadai. Selain itu, teori kepastian hukum menjadi dasar perlunya regulasi yang jelas agar memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal serta minimnya pengaturan pemidanaan terhadap bank menyebabkan bank cenderung tidak bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemidanaan terhadap bank dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Hilangnya Dana Nasabah, Pemidanaan, Sistem Perbankan.

ABSTRACT

The case of loss of customer funds due to weaknesses in the banking system has become a serious problem in the modern banking world. This phenomenon shows a gap in the security system and weak regulations related to criminal liability for banking corporations. In the Indonesian legal system, regulations regarding criminal penalties for banks as legal entities are still limited, thus creating legal uncertainty for customers who are harmed. This thesis aims to examine the urgency of criminal regulation for banks in cases of loss of customer funds due to weaknesses in the banking system using a normative legal approach. This study is based on the theory of corporate criminal liability which states that a legal entity can be subject to criminal sanctions if it is proven to have committed or allowed a crime to occur through a negligent or inadequate system. In addition, the theory of legal certainty is the basis for the need for clear regulations to provide legal protection for customers. The results of the study indicate that the weak internal supervision system and the lack of criminal sanctions against banks cause banks to tend not to be criminally responsible. Therefore, legal reform is needed that explicitly regulates the mechanism of criminal sanctions against banks within the framework of Indonesian criminal law.

Keywords: *Loss of Customer Funds, Banking System, Criminalization.*